

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Masyarakat semakin menuntut tata pemerintah dengan baik atau biasanya di sebut (*good governance*) untuk mendorong pemerintahan pusat maupun daerah dalam penerapan tanggung jawab publik. Prinsip pemerintahan yang baik diantaranya yaitu partisipasi masyarakat, penegaknya supremasi hukum, transparansi, pemerataan, efektifitas dan pelaksanaan akuntabilitas. Akuntabilitas memperwajibkan pejabat publik baik pejabat daerah maupun pusat dalam melakukan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kewajiban mereka salasatunya dalam melaporkan entitas keuangan.

Laporan keuangan pemerintah daerah harus melaporkan realisasi anggaran yang berdasarkan PSAP 02 bahwa pelaporan realisasi anggaran merupakan anggaran entitas pelaporan secara tersanding dan memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan derajat pencapaian target yang sudah disepakati.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang telah di rencanakan pemerintah kepada suatu daerah adalah menjadi alat pengendalian sekaligus menjadi alat perencanaan., Anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi asal dana publik yang sudah di setujui legislatif untuk di belanjakan sedangkan Anggaran menjadi alat perencanaan mengindikasikan target yang harus di capai oleh pemerintah.

Menilai laporan keuangan pemerintah wilaya dalam pengelolaan keuangan bisa dilakukan menggunakan cara menganalisis laporan realisasi anggaran yang telah di lapor. LRA haruslah menyiapkan kabar yang berguna bagi pengguna laporan yang dilaksanakan dengan cara efektif, efisien, dan hemat menggunakan peraturan perundang-undangan. Melalui Laporan Relisasi Anggaran (LRA) Belanja yang terdapat pada BPKAD Kota Medan akan ditinjau apakah anggaran yang sudah di kerjakan dapat berfungsi menjadi pengendali terhadap pelaksanaan aktivitas kegiatan pemerintah.

Pemerintah wilayah wajib membagikan belanja daerah dengan adil dan merata sehingga semua bisa dinikmati para masyarakat tanpa diskriminasi, terkhusus pada pemberian pelayanan umum. oleh sebab itu supaya dapat mengendalikan taraf efisiensi dan efektifitas anggaran, dan oleh karena itu persiapan anggaran belanja harus diperhatikan penetapannya sebagai ketaraan tujuan dan sasaran, nilai dan manfaat dengan

indeks kinerja yang ingin dimiliki, penetapan prioritas aktivitas dan penaksiran beban kerja, dan penetapan harga satuan yang rasional (Andy2008:46).

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang ada di latar belakang diatas , maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah realisasi anggaran belanja pada BPKAD Kota Medan ?
2. Bagaimana pertumbuhan belanja pada BPKAD pada tahun 2017-2020 ?
3. Bagaimana tingkat efisiensi belanja pada BPKAD Kota Medan pda tahun 2017-2020 ?

I.3. Tinjauan Pustaka

A. Pengertian LRA

Permendagri RI (republik indonesia) NO 64 tahun 2013 mengenai implementasi Standart Akuntansi pada Pemerintahan Berfundamen Akrual Pada Pemda mengatakan, Laporan Realisasi Anggaran yang kemudian disingkat menjadi LRA merupakan laporan yang menyediakan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembelanjaan dan sisa lebih/kurang pembelanjaan anggaran, yang tiap tiap perbandingan menggunakan anggaran seperiode.

B. Tujuan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Adapun tujuan Laporan Realisasi Anggaran adalah:

1. Tujuan standart LRA merupakan pemutuskan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah dengan rangka melengkapi tujuan akuntabilitas begitu juga dengan menetapkan peraturan per UU (undang-udangan).
2. Tujuan pelaporan realisasi anggaran yaitu untuk mengajukan informasi tambahan akan realisasi dan anggaran badan pelaporan perbandingan. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat pencapaian target-target yang sudah disepakati antara legislatif dan eksekutif berdasarkan peraturan per UU (undang-undangan).

C. Manfaat Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Peraturan Pemerintah NO 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan berbagai hal , yaitu sebagai berikut:

1. LRA mengajukan informasi tentang realisasi pendapatan, peneluaran (belanja), transfer, surplus/defisit dengan pembiayaan dari suatu unit pelaporan yang diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi ini dapat bermanfaat bagi para penggunaan laporan dalam menilai keputusan tentang pengalokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- a. Mempersiapkan informasi tentang asal penyaluran dana dan pemakaian sumber daya ekonomi
- b. Mempersiapkan informasi tentang laporan realisasi anggaran secara lengkap yang bermanfaat untuk menilai kinerja pemerintah dengan hal efisiensi dan efektivitas penerapan anggaran.

2. LRA memberikan informasi yang bermanfaat untuk mencari sumber daya ekonomi yang diperoleh pada membiayai kegiatan pemerintah pusat dan wilayah pada periode berikut melalui penyampaian laporan secara komparatif. laporan realisasi anggaran untuk menyediakan informasi kepada pengguna laporan sumber daya ekonomi:
- a. sudah melaksanakan dengan efisien, efektif, dan hemat
 - b. sudah melaksanakan sesuai anggaran (APBN/APBD) dan
 - c. sudah melaksanakan sesuai peraturan per UU (undang-undangan)

D. Isi Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan beragam unsur Pendapatan, belanja, Surplus/defisit, transfer dan pembiayaan dengan anggaran. LRA dijelaskan lebih rinci dengan tulisan atas laporan keuangan dan mencakup hal-hal yang memotivasi penerapan anggaran, seperti prosedur fiskal dan moneter, alasan terjadinya selisih yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang harus diuraikan dan dijelaskan. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengutarkan Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

- Pendapatan
- pembelian (Belanja)
- Transfer
- Surplus / defisit
- Penerimaan pembiayaan
- Pengeluaran pembiayaan
- Pembiayaan bersih dan saldo pembiayaan (Neto)
- Sisa kelebih/Kekurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA)

Laporan Realisasi Anggaran di jelaskan dengan rinci pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Penjelasan anggaran ibarat strategi fiskal dan moneter, alasan terjadinya kelainan yang signifikan antara anggaran dan realisasi, dan daftar-daftar yang di tentukan lebih ditinggi dari pada angka-angka yang harus di jelaskan.

E. Analisis Variance Belanja dan Pertumbuhan Belanja

1. Analisis Variance Belanja

Anggaran Belanja yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai batasan maksimal pembiayaan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah bagian wilayah . didalam hal ini, Pemerintah daerah dianggap memiliki kemampuan belanja yang baik jika realisasi belanja tidak melampaui belanja yang dianggarkan. Analisis Varians Belanja merupakan analisis yang terhadap perbedaan selisih antara realisasi dan anggaran. Besarnya varians anggaran belanja dengan realisasinya bisa menyatakan dengan bentuk nilai nominalnya maupun persentase. perselisih anggaran belanja di kagolongkan pada 2 bentuk yaitu:

- a. selisih disukai (favourable variance), di beri tanda (F)
- b . selisih tidak disukai (unfavourable variance), di beri tanda (UF)

Jika selisih realisasi belanja > (lebih kecil) dibandingkan anggaran berarti mengidentifikasikan favourable variance atau penghematan anggaran. Sebaliknya jika selisih realisasi belanja < (lebih besar) dari anggaran berarti mengidentifikasikan unfavourable variance atau adanya pemborosan anggaran.

Variance belanja daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Variance} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

(Sumber :Mahmudi,2016 : 155)

$$\% \text{ Varians} = \frac{\text{Anggaran} - \text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100 \%$$

(Sumber :Halim, 2002 dalam kuncoro 2008:135)

2. Mengukur tingkat Pertumbuhan Belanja

Menurut Mahmudi (2016) Mengukur tingkat pertumbuhan pengeluaran/belanja dimaksudkan untuk mengetahui evolusi pengeluaran dari satu tahun ke tahun berikutnya. secara umum, pengeluaran/belanja mempunyai kecendrungan untuk terus meningkat. penyebab kenaikan belanja kebanyakan terkait dengan inflasi, pergantian nilai rupiah, pergantian cakupan cakupan layanan, dan penyesuaian faktor ekonomi makro. cara membandingkan realisasi anggaran belanja dari tahun tertentu terhadap realisasi anggaran tahun setelahnya, begitu juga dengan perbandingan tahun-tahun berikutnya.

Pertumbuhan Belanja dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Pertumbuhan belanja tahun n} = \frac{\text{Realisasi Belanja Thn1} - \text{Realisasi Belanja Thn n-1}}{\text{Realisasi Belanja Thn n-1}} \times 100 \%$$

Keterangan:

Tahun n = tahun pertumbuhan belanja yang ingin dicari

Tahun 1 = tahun sebelum tahun n

Sumber : Mahmudi (2016: 158)

3 Mengukur Efisiensi Laporan Realisasi Anggaran

Mahmudi (2016: 164) Rasio efisiensi belanja adalah perbedaan antara realisasi belanja dan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja dapat dipergunakan untuk mengukur besar pengiritan anggaran yang digunakan oleh pemerintah, penghassilan angka dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif, pengertiaannya tidak ada standar baku yang di anggap baik untuk rasio ini. pemprosesan aktivitas

operasional bisa disebut efisien ketika suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penerapan sumber daya dengan dana yang sedikit dikitnya.

Analisis Efisiensi dapat diukur dengan cara:

$$\text{EFISIENSI} = \frac{\text{REALISASI ANGGARAN BELANJA}}{\text{ANGGARAN BELANJA}} \times 100 \%$$

Sumber: Mahmudi (2016:164)

Ketentuan Menteri Dalam Negeri No 690.900-327 tahun 1996 kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja yaitu:

1. Apabila hasil dari pencapaian lebih besar (<) dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan efisien.
2. Apabila hasil dari pencapaian 90% - 100%, maka anggaran belanja dapat dikatakan kurang efisien.
3. Apabila hasil dari pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dapat dikatakan cukup efisien.
4. Apabila hasil dari pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dapat dikatakan efisien.
5. Apabila hasil dari pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dapat dikatakan sangat efisien,

1.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah yang ada dilatar belakang , yang menjadi hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : pertumbuhan belanja pada BPKAD tahun 2017-2020 terjadi fluktuasi, di karenakan adanya faktor belanja yang relatif meningkat setiap tahun

H2 : Tingkat efisiensi belanja pada BPKAD Kota Medan tahun 2017-2020 sangat bervariasi